

RINGKASAN BERITA HARI INI

Gelontor BLT kepada 3.383 Buruh Pabrik Rokok Sidoarjo

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, mengatakan bahwa BLT (Bantuan Langsung Tunai) akan disalurkan kepada 3.383 buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh pabrik rokok.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT.

Penyaluran BLT ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo. Muliawan berharap, dengan adanya BLT ini, buruh pabrik rokok dapat meringankan beban hidupnya.

SEBANYAK 3.338 KARYAWAN PABRIK ROKOK MENERIMA BLT - DBHCHT DARI PEMKAB

Sebanyak 3.338 karyawan pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Bantuan Hidup Cepat (DBHCHT) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT dan DBHCHT.

Pembahasan Raperda LP2B Bakal Digabung dengan RTRW

Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Kabupaten Sidoarjo akan menggabungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pengelolaan Ruang dan Tata Ruang (LP2B). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan wilayah.

Libur Lebaran, Kawasan Wisata Harus Aman dan Bebas Pungli

Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) Kabupaten Sidoarjo akan menggabungkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pengelolaan Ruang dan Tata Ruang (LP2B). Hal ini bertujuan untuk menyederhanakan proses perencanaan wilayah.

Siswa MA NU Sidoarjo Diwarnai PTN Jalur SNBP 2023 Mengalami Peringatan

Siswa-siswa di Madrasah Aliyah (MA) NU Sidoarjo yang mengikuti Program Tuntutan Nasional (PTN) Jalur Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) 2023 mengalami berbagai tantangan dan perjuangan.



Siswa-siswa MA NU Sidoarjo yang mengikuti PTN Jalur SNBP 2023.

Perjuangan mereka dalam mengikuti seleksi ini sangat berat, namun mereka tetap semangat dan berambisi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi.

Jelang Lebaran 3.383 Buruh Pabrik Rokok Digelontor BLT

Jelang Lebaran, 3.383 buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo akan menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan buruh pabrik rokok.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT.

TP PKK Sidoarjo Baksos ke Liponsos

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) ke Liponsos. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.



Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Baksos ke Liponsos.

IMBAS PROYEK PEMASANGAN PIPA PDAM, JALAN DI DESA JUMPUTREJO RUSAK PARAH

Salah satu dampak dari proyek pemasangan pipa PDAM di Desa Jumputrejo adalah rusaknya parah jalan di sana. Hal ini menimbulkan keluhan masyarakat setempat.



Rusak parahnya jalan di Desa Jumputrejo akibat proyek pemasangan pipa PDAM.

Propemperda Direvisi, Jumlah Raperda Ber-

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidoarjo akan direvisi. Hal ini bertujuan untuk menyesuaikan isi Perda dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama tim yang terlibat dalam revisi Perda.

Revisi Perda ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas peraturan daerah Kabupaten Sidoarjo.

TP PKK Sidoarjo Baksos ke Liponsos

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) ke Liponsos. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.



Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Baksos ke Liponsos.

Lomba Literasi Anak

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Lomba Literasi Anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi anak-anak di Kabupaten Sidoarjo.



Anak-anak mengikuti Lomba Literasi Anak yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo.

SEBANYAK 3.338 KARYAWAN PABRIK ROKOK MENERIMA BLT - DBHCHT DARI PEMKAB

Sebanyak 3.338 karyawan pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Bantuan Hidup Cepat (DBHCHT) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT dan DBHCHT.

SOSIAL



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT.

TP PKK Sidoarjo Baksos ke Liponsos

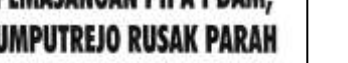
Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan kegiatan Bakti Sosial (Baksos) ke Liponsos. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana.



Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo melaksanakan Baksos ke Liponsos.

IMBAS PROYEK PEMASANGAN PIPA PDAM, JALAN DI DESA JUMPUTREJO RUSAK PARAH

Salah satu dampak dari proyek pemasangan pipa PDAM di Desa Jumputrejo adalah rusaknya parah jalan di sana. Hal ini menimbulkan keluhan masyarakat setempat.



Rusak parahnya jalan di Desa Jumputrejo akibat proyek pemasangan pipa PDAM.

Lomba Literasi Anak

Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan Lomba Literasi Anak. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan keterampilan literasi anak-anak di Kabupaten Sidoarjo.



Anak-anak mengikuti Lomba Literasi Anak yang diselenggarakan oleh Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo.

SEBANYAK 3.338 KARYAWAN PABRIK ROKOK MENERIMA BLT - DBHCHT DARI PEMKAB

Sebanyak 3.338 karyawan pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan Dana Bantuan Hidup Cepat (DBHCHT) dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran ini dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo.



Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sidoarjo, Ahmad Muliawan, bersama buruh pabrik rokok penerima BLT dan DBHCHT.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Lomba Literasi Anak, Disperpusip Sidoarjo Ajak Pelajar Gemar Membaca Dan Menulis



LITERASI - Kepala Disperpusip Pemkab Sidoarjo, Ridho Prasetyo dan anggota Komisi D DPRD Zahlul Yussar melihat peserta lomba literasi membaca dan menulis di Yussar Fishing and Playground Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Kamis (13/04/2023).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Disperpusip) Pemkab Sidoarjo menggelar Lomba Literasi Anak di Yussar Fishing and Playground yang berada di Desa Kalidawir, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Kamis (13/04/2023).

Lomba ini dinilai penting lantaran menunjukkan kemampuan dan keterampilan individu dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung dan memecahkan masalah pada tingkat keahlian tertentu. Hal ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Kepala Disperpusip Pemkab Sidoarjo, Ridho Prasetyo mengatakan tujuan utama lomba literasi anak ini dalam rangka menumbuhkembangkan kemampuan anak mempunyai minat baca dan menulis secara aktif.

"Kecerdasan seorang anak itu timbul dari kegemarannya dalam membaca. Ketika anak-anak suka membaca, menulis dan bercerita, otomatis buku pelajaran akan disukai dan selalu belajar," ujar Ridho Prasetyo kepada republikjatim.com, Kamis (13/04/2023).

Bagi Ridho lomba Literasi anak dalam membaca dan menulis ini diikuti beberapa perwakilan dari Sekolah Dasar (SD) dari 18 Kecamatan se Kabupaten Sidoarjo. Total pesertanya berjumlah 88 anak dari kelas 4 dan 5 yang diikuti dari 46 SD.



"Mekanismenya mereka diberi waktu membaca 15 menit. Mereka bebas bercerita apa yang mereka baca di depan dewan juri. Disitu peserta bisa belajar menganalisa dan menyimpulkan bacaan," ungkapnya.

Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo, Zahlul Yussar yang hadir dalam gelaran lomba itu menilai kegiatan ini menjadi terobosan baru Disperpusip Pemkab Sidoarjo dalam menggelar lomba literasi di suatu tempat wisata. Dirinya, melihat antusiasme anak-anak peserta ketika mengikuti lomba literasi membaca dan menulis itu. Hal ini karena tempatnya di area (tempat) wisata.

"Minat baca tulis juga harus kita dorong untuk semua kalangan masyarakat. Tidak hanya pada anak saja. Karena itu, di wisata Yussar Fishing and Playground, juga disediakan ruang Pojok Baca dengan tujuan agar para pengunjung lain khususnya anak-anak mampir dalam gemar membaca," urainya.

Anggota dewan termuda ini mengaku sangat prihatin terhadap fenomena anak-anak saat ini yang sering menghabiskan waktunya bersama gadget. Pencegahannya, harus dilakukan dari mulai pengawasan orang tua terhadap penggunaan gadget.

"Minimal anak-anak ini tahu cara mengatur waktu serta pengawasan materi yang mereka buka," tandasnya. Zal/Waw

✓ Gelontor BLT kepada 3.383 Buruh Pabrik Rokok Sidoarjo

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pemkab Sidoarjo Jawa Timur menggelontor bantuan langsung tunai (BLT) kepada 3.383 orang buruh dari 53 pabrik rokok yang ada di kabupaten setempat.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, bantuan yang digelontorkan tersebut yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023.

"Nominalnya Rp275 ribu per bulan. Rincian BLT yang diberikan mulai Januari, Februari dan Maret dengan total Rp825 ribu," ucapnya disela penyerahan secara simbolis BLT kepada para buruh pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu (12/4). Ia menyampaikan bantuan

seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.

Bantuan tersebut kata Gus Muhdlor sapaan akrabnya menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan warga serta terdapat kenaikan penerima bantuan dari 2 ribuan orang, kini sudah mencapai 3 ribu orang. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban anda semua," ucapnya.

Ia mengatakan, upaya Pemkab Sidoarjo mensejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan saja. Salah satunya pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo.

"Lewat Disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor (dua kanan) menyalurkan secara simbolis DBHCHT kepada buruh pabrik rokok.

sehingga lebih produktif agar menjadi seorang pengusaha di rumah masing-masing," ujarnya.

Upaya ini, kata dia, sebagai bentuk keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada

industri rokok untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut.

Saat ini Pemkab Sidoarjo tengah membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) di wilayah Kecamatan Porong yang akan menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnis.

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT di kawasan Porong yang akan mewedahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya," katanya. (ant/rd)

HARIAN
BANGSA

Koran Warga Jatim

Siswa MA NU Sidoarjo Diterima PTN Jalur SNBP 2023 Mengalami Peningkatan

Sidoarjo, Bhirawa

Sebanyak 41 siswa Madrasah Aliyah NU (MANU) Sidoarjo berhasil diterima di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur SNBP

(Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi) 2023. Tahun ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan, kalau dibanding tahun sebelumnya hanya 21 siswa.

SNBP adalah tes yang dilaksanakan berdasarkan prestasi. Prestasi ini dapat berupa prestasi akademik dan/atau non akademik. Yakni dengan mempertimbangkan prestasi berdasarkan dua komponen penilaian, yaitu Minimal 50% rerata nilai rapor keseluruhan dan Maksimal 50% komponen penggali minat dan bakat.

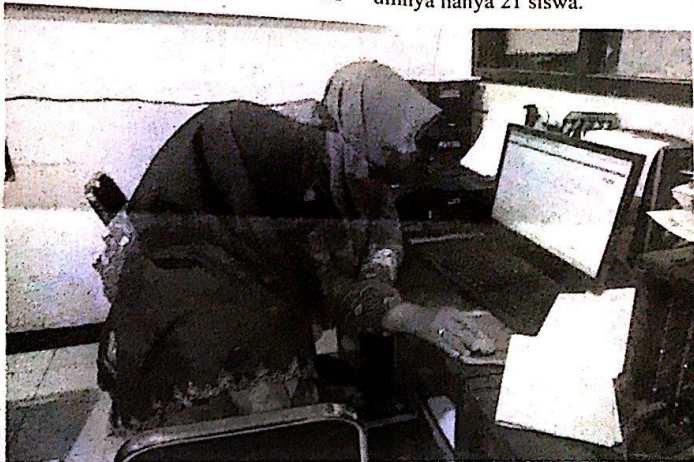
Kepala MANU Sidoarjo, M Baidlowi menyampaikan rasa syukur dan bangga atas prestasi yang diraih oleh siswa – siswinya. Semua itu tentu tidak lepas dari kesungguhan dan keuletan Bapak/Ibu guru dan tenaga kependidikan di madrasah.

Menurutnya, dengan meningkatnya prestasi siswa-siswa ini karena pihaknya sering melakukan pembinaan terhadap bidang studi yang biasanya diarahkan, bagaimana caranya nilai-nilai anak-anak terus selalu meningkatkan prestasinya. "Termasuk juga pembinaan-pem-

binaan dalam tingkat nasional, sertifikat-sertifikat itulah juga termasuk menjadi model mereka untuk masuk ke PTN," katanya.

Sementara itu, guru Bimbingan Konseling dan Psikolog, Winda juga menambahkan kalau mereka para siswa yang sudah mempunyai prestasi khusus itu terus kita kawal. Sejak masuk kelas X, XI kita berikan pendampingan terus agar waktu di kelas XII prestasinya terus membaik. "Tatkala masuk ke perguruan tinggi sudah benar-benar siap, tidak memalukan," katanya.

"Memang pendampingan yang kami lakukan sejak awal tetap mengikuti minat siswa yang ingin masuk ke PTN sesuai potensi mereka. Dari 41 siswa itu, 19 diantaranya diterima di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) Unesa. Siswa lain juga diterima di Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional dan Universitas Negeri Malang," tambahnya. [ach.why]



ahmad suprayogi/bhirawa

Guru BK melakukan pendampingan cari data siswa MA NU yang diterima PTN Jalur SNBP.

HARIAN
Bhirawa

Web: www.bhirawa.com

Libur Lebaran, Kawasan Wisata Harus Aman dan Bebas Pungli

KOTA-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk mengoptimalkan pengamanan transportasi. Baik di darat, laut, hingga udara menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Upaya optimalisasi pengamanan dapat dilakukan melalui koordinasi dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk TNI/Polri.

Wakil Ketua DPRD Sidoarjo Kayan mengatakan mengatakan bahwa hal ini penting. Pemkab perlu melakukan koordinasi dengan TNI/Polri untuk mengoptimalkan pengamanan di berbagai titik transportasi menjelang Hari Raya hingga pasca Lebaran.

Menurut dia, tim pengamanan akan dibentuk menjelang hari-hari besar keagamaan. Terdiri dari sejumlah pihak terkait, termasuk TNI/Polri. "Tim pengamanan tersebut harus memastikan bahwa kinerjanya di lapangan dapat berjalan optimal," katanya.

Selain itu, Kayan mengingatkan agar pemerintah menempatkan satu atau dua petugas di tempat-tempat vital seperti lokasi wisata. Tujuannya untuk mengantisipasi keramaian pengunjung pasca Lebaran. Hal ini perlu dilakukan karena pengunjung di tempat-tempat wisata akan membeludak setelah Lebaran. Sebab terkadang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang mengganggu ketertiban masyarakat.

Politikus Gerindra tersebut juga mengingatkan bahwa Pemkab perlu mewaspadai pungutan liar (pungli) di sejumlah kawasan wisata saat libur Lebaran. Penentuan titik-titik parkir dan petugasnya harus segera dilakukan. "Sehingga nanti tidak timbul parkir-parkir liar yang memungut tarif tinggi," imbuhnya.

Begitu juga dengan pungli pada tarif masuk kawasan wisata. Hal itu nantinya akan menjadi salah satu penyebab kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) retribusi kawasan wisata. (nis/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



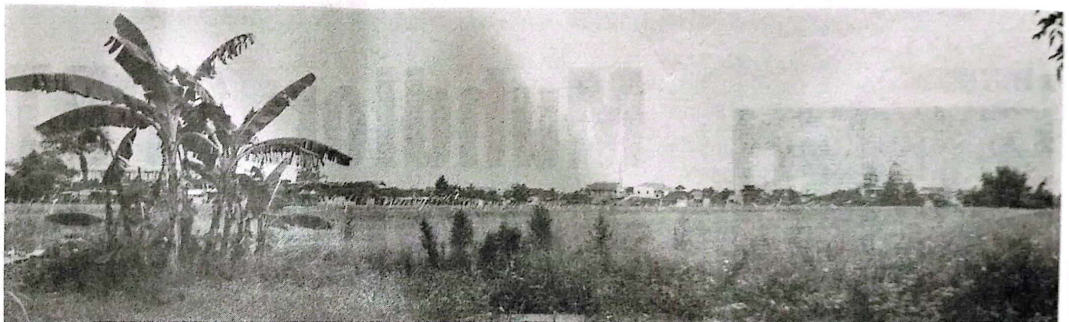
14 APRIL 2023 | 10

Pembahasan Raperda LP2B Bakal Digabung dengan RTRW

KOTA-Panitia khusus (pansus) DPRD Sidoarjo yang akan membahas rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) bakal dibubarkan. Hal itu karena pembahasan raperda LP2B akan digabung dengan raperda Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW).

Ketua Pansus Deny Haryanto mengatakan, penggabungan itu dilakukan agar raperda LP2B bisa terakomodir. Sebab dalam membahas raperda RTRW, di dalamnya juga mengatur tentang Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). "Sama saja, hanya digabung agar lebih efisien pembahasannya," ujarnya.

Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang digelar Rabu (12/4) malam. Agenda dalam rapat tersebut adalah penyam-



DIPERTAHANKAN: Lahan hijau yang masih produktif di Desa Sidodadi, Kecamatan Sidoarjo.

paian pendapat bupati terhadap nota penjelasan DPRD membahas Raperda LP2B. Sebelumnya, raperda usulan Komisi B tersebut sudah masuk tahap nota penjelasan dan pembentukan pansus pada pertengahan Februari lalu.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor yang hadir dalam

rapat paripurna tersebut mengatakan, penetapan KP2B merupakan bagian dari penetapan tata ruang kawasan pedesaan dalam RTRW. Ahli fungsi KP2B pun juga harus memenuhi beberapa kriteria. Seperti memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu.

Selain itu juga lahan menghasilkan bahan pangan po-

kok dengan tingkat produksi yang memenuhi kebutuhan pangan. Baik di tingkat kabupaten, provinsi, maupun nasional. Atas pertimbangan tersebut, pihaknya meminta agar raperda LP2B ditinjau kembali.

"Agar memprioritaskan penyusunan RTRW sebagai rumah besar perencanaan

pembangunan daerah 20 tahun ke depan," ujarnya.

Sebelumnya, pembentukan raperda LP2B dilakukan untuk mempertahankan areal pertanian dari ancaman alih fungsi lahan. Sebab lahan pertanian harus dilindungi sebagai wujud komitmen dalam program ketahanan pangan. (nis/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Rencana Dua Arah Jalan Raya Juanda Belum Pasti

SIDOARJO – Rencana membuat Jalan Raya Juanda sisi utara menjadi dua arah terus dikaji. Rencana tersebut dibuat untuk mengurai kemacetan di kawasan Aloha saat ujung Jalan Raya Juanda di sisi selatan ditutup total pada 28 April mendatang.

Kepala Bidang Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dishub Sidoarjo Dwi Tjahjo Mardisunu menyebut saat ini Jalan Raya Juanda sisi utara masih digunakan satu arah. Yakni, bagi pengendara dari barat ke timur. "Kajian belum selesai sehingga saat ini belum bisa kami jadikan dua arah,"

katanya kemarin (13/4).

Jika hasil kajiannya memang efektif, penerapan dua arah mulai dilakukan. Targetnya, sebelum 28 April, ada keputusan jalan dijadikan dua arah atau pengendaraan dari Juanda ke Surabaya dilewatkan *frontage road* dan putar balik di depan Perumahan Puri Surya Jaya. Sebab, mulai 28 April petugas memasang tiang pancang *bored pile* di titik P5-B yang berada di dekat pos penjagaan pintu kereta api. Akibatnya, pengendara dari Juanda ke Surabaya tidak bisa lagi lewat ujung Jalan Raya Juanda sisi selatan

dan memutar bundaran Aloha. "Semoga bisa segera ada hasil kajiannya dan bisa segera disiapkan," tuturnya.

Sementara itu, hingga kemarin kemacetan terlihat di kawasan Aloha. Kemarin sore pengendara dari Sidoarjo ke utara atau ke arah Surabaya masih terjebak kemacetan di Jalan Raya Waru atau di sebelah barat bundaran Aloha. Kemacetan juga tampak di *frontage road* Gedangan. Imbas volume kendaraan dan penyempitan jalan karena ada proyek pembangunan *flyover* Aloha. (uzi/c14/any)

Jawa Pos

SEBANYAK 3.338 KARYAWAN PABRIK ROKOK MENERIMA BLT - DBHCHT DARI PEMKAB

Sidoarjo, Pojok Kiri

Menjelang liburan hari raya idul fitri 1444 H Bupati Sidoarjo Ahmad Mubdlor Ali menyalurkan BLT - DBHCHT (Dana Bantuan Langsung Tunai Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) kepada ribuan karyawan pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo. Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan total jumlah penerima BLT - DBHCHT sebanyak 3.338 karyawan.

Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

tahun 2023, secara simbolis diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Mubdlor Ali kepada para karyawan pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin dengan nominalnya Rp. 275.000/bulan mulai Januari - Maret dengan total Rp. 825.000, dengan Anggaran yang digelontorkan oleh Pemkab kurang lebih mencapai Rp. 11 milyar.

Bupati Sidoarjo Ahmad Mubdlor Ali menyampaikan "kami dapat perintah dari pemerintah pusat, semua bantuan sosial harus di turunkan sebelum hari raya, seperti BLT - DBHCHT,

harus di percepat karena ada kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya. Dari 2.296 orang, kini mencapai 3.338 orang dan ada 153 penyokongnya seperti sopir dan sebagainya, karena bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk kesejahteraan warga" ucapnya Rabu (12/4).

"Pemerintah punya atensi lebih, keberpihakan lebih untuk menjaga ekosistem yang baik, baik ekosistem ekonomi, sosial dan ekosistem kemasyarakatan terhadap industri rokok bagaimana semua pihak di

untungkan dan semua pihak mendapat perhatian sehingga semua pihak dapat berjalan tanpa mengantungkan dengan yang lainya, karena ini sebagai tugas kita bersama" Tambahnya.

"Termasuk Dari menteri Sosial menggelontorkan 276.000 kemas beras 10 kg kepada masyarakat baik by Name dan by adres sudah ada dan di bagi menjadi 3 bulan, jadi mentri sosial perbulan menggelontorkan hampir 92.000 lebih, dan itu sudah tersebar sebelum hari raya, dan harus kita kawal secara bersama-sama" Urainya.



"Terkait ketahanan pangan, terkait kestabilan harga terkait pengendalian inflasi,

pemerintah punya komitmen yang besar agar hari raya nanti berlangsung dengan

nyaman, tertib dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan" Pungkasnya. (Nang)

Dipindai dengan CamScanner





Pemberian pengarahan kepada siswa sebelum dilakukan praktek lapangan.

BJK Surabaya Uji Sertifikasi di SMKN 1 Sidoarjo

Sidoarjo, Bhirawa

Masih belum banyaknya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang mempunyai skema untuk Mandor Kontruksi, khususnya di sekolah kejuruan. Akibatnya, pihak Balai Jasa Kontruksi (BJK) Wilayah IV Surabaya turun tangan melakukan jemput bola, untuk mengampu jabatan kerja yang tidak ada sertifikasi Mandor Kontruksi.

Kali ini dilakukan di SMK Negeri 1 Sidoarjo, pada Rabu (12/4) siang. Prosesi pembukaannya oleh Kepala SMK Negeri 1 Sidoarjo, didampingi perwakilan BJK Wil IV Surabaya serta menghadirkan para Asesor dari LPJK (Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi).

Perwakilan BJK Wil IV Surabaya Umi Syarifah men-

jelaskan kalau kegiatan ini bertujuan untuk mengakomodir skema-skema yang tidak diampu oleh LSP. Karena dari sekian banyak LSP itu belum ada yang punya skema untuk Mandor Kontruksi. Oleh karena itu, untuk memfasilitasinya, BJK Wil IV Surabaya melakukan jemput bola.

"Jadi seluruh SMK se Indonesia ditawarkan khususnya yang ada jurusan BKP (Bisnis Kontruksi dan Property), kalau mau ikut uji sertifikasi melalui LPJKN bisa dibantu sama Balai Jasa Kontruksi, tapi mereka harus mendaftar terlebih dahulu, melalui imput data yang telah ditentukan waktunya," jelas Umi Syarifah.

Ia katakan kalau tujuan utamanya sertifikasi nasional ini adalah untuk memfasilitasi

ketika anak-anak terjun ke dunia kerja. "Tentunya set-lap lembaga atau badan usaha pemerintah dalam bidang jasa kontruksi, dalam rekrutmen biasanya ada sertifikasinya. Makanya dalam kegiatan sekarang ini paling tidak membekali mereka punya legalitas sertifikat yang berlisensi," tegas Umi Syarifah.

Wartini, S.Pd M.Pd sebagai guru BKP SMK Negeri 1 Sidoarjo mengatakan, sesuai basic atau kompetensi yang selama dipejari anak-anak, khususnya kelas XII 32 siswa Jurusan BKP ini nantinya memang arah ke pekerjaan bangunan. Walaupun tidak semuanya langsung bekerja, mungkin ada yang kuliah maupun berwirausaha. Hampir 50 persen siswa kami adalah diterima pekerjaan di bagian

kontruksi, perencana, pelaksana maupun pengawas. "Makanya kalau ada uji sertifikasi seperti sekarang ini, kami sangat berharap sekali, karena ini memang salah satu modal penguatan kompetensi siswa. Juga sebagai penunjang di pekerjaan-pekerjaannya nanti sangat dibutuhkan. Karena sekarang setiap pekerjaan membutuhkan sertifikasi kompetensi," katanya.

Sekolah sangat mengapresiasi, karena kita memang mengharapkan kegiatan-kegiatan sertifikasi seperti sekarang ini. Pertama sebagai pengakuan kompetensi siswa, juga untuk SDM di bidang kontruksi sertifikasi ini masih sangat diperlukan. Saya berharap kegiatan-kegiatan sertifikasi seperti ini terus ada," harap Wartini.

Sementara itu, salah satu Asesor dari LKPJ, Ir. Effendi, ST juga menambah adapun materi yang diujikan sebagai syarat kelulusan sertifikasi, diantaranya adalah tes tulis 20 soal pilihan ganda, yang dilanjutkan dengan praktek membuat bouwplank. Fungsinya adalah untuk menentukan titik pondasi, tinggi bangunan/peil.

"Jadi pada intinya, siswa yang dinyatakan lulus/kompeten itu harus menjalankan asesesi melalui tiga tahapan. Yaitu uji tulis, praktek lapangan dan wawancara. Termasuk kompetensi menguasai knowledge, skill dan attitude. Pengetahuan (ilmu) dalam uji tulis, kemampuan (dalam praktek), sikap terhadap atasan bawahan (termasuk lingkungan) serta SDM-nya," jelas Effendi. [ach.why]

Maksimalkan Layanan Pajak Virtual lewat WA dan Email

SIDOARJO, SURYA - Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Kabupaten Sidoarjo terus berusaha menerapkan layanan secara virtual. Utamanya terkait menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2).

Menurut Kepala BPPD Sidoarjo, Ari Suryono, layanan tersebut bisa melalui kanal virtual berbasis Whatsapp dan email. Diharapkan ke depan layanan tersebut bisa dinikmati seluruh warga Sidoarjo.

Mekanisme penyampaian virtual tersebut bisa dikatakan lebih cepat dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 SPPT PBB-P2 baru tersampaikan kepada masyarakat pada bulan Maret-April setiap tahunnya, dengan ini bisa jauh lebih cepat.

"Tahun 2024 seluruh masyarakat Kabupaten Sidoarjo yang memiliki, menguasai, memanfaatkan objek PBB di Wilayah Kabupaten Sidoarjo dapat menerima



SURYA/M TAUFIK

VIRTUAL - Suasana pembayaran pajak daerah melalui virtual, Kamis (13/4).

SPPT PBB P2 secara virtual," lanjut Ari.

Mantan Kepala DPMSP itu juga menjelaskan, untuk mempercepat realisasinya ia meminta kepada masyarakat untuk mendaftarkan nomor Whatsapp dan email melalui form yang bisa diakses lewat link berikut: https://s.id/Pendaftaran_PBB_SDA.

"Bagi masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) objek pajak dapat dilakukan pendaftaran secara sekaligus meskipun berbeda kecamatan selama masih

berada di ruang lingkup Wilayah Kabupaten Sidoarjo," ungkapnya.

Masih menurut Ari, nama SPPT PBB-P2 yang didaftarkan pun tidak harus sama dengan nama pendaftar atau pemohon.

Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran tersebut karena penyampaian SPPT akan secara penuh dilakukan melalui Whatsapp, tidak lagi diantarkan oleh petugas BPPD Kabupaten Sidoarjo maupun pihak Desa atau Kelurahan. (ufi)



AHMAD REZA/JAWA POS

JADI PENANDA: Deretan pohon pisang yang terpasang di Jalan Raya Tropodo Kulon kemarin.

"Kebun" Pisang Dadakan di Jalan Tropodo Kulon

SIDOARJO - Pohon pisang tampak berjejer di jalanan RT 19, RW02, Tropodo Kulon, Tropodo, Waru. Pohon pisang itu sengaja ditanam warga agar para pengendara bisa berhati-hati melewati jalanan yang terendam air dan berlubang tersebut.

Seperti sedang uji adrenalin. Begitu kata Ahmad Zainal, warga sekitar, sehabis melewati jalan tersebut kemarin (13/4). Adrenalinnya terpacu karena dia harus menebak lubang di jalan terendam itu berada di titik mana. "Salah tebak mana yang lubang mana yang gak bisa jatuh basah kuyup saya," ucap pria

35 tahun tersebut.

Menurut dia, sejak Selasa (11/4) jalanan di RT 19 itu terendam banjir. "Airnya *kan* menggenang gak bisa *ngalir*. Akhirnya *gitu* terus. Hujan juga rutin tiga hari ini. Airnya di situ terus," katanya.

Sementara itu, Ketua RT 19, RW 02, Tropodo Kulon, Choirin Basyar menyatakan bahwa pohon pisang ini juga merupakan bentuk protes warga atas tidak segera diperbaikinya jalan tersebut.

Selain kesal, Basyar menjelaskan bahwa masyarakat meletakkan delapan pohon pisang tersebut karena jalanan yang terendam dan berlubang sering

memakan korban. Buktinya, pada Senin (10/4), Basyar melihat ada kurir ekspedisi yang terjatuh dan basah kuyup karena terkena lubang.

"Kalau hujan pasti banjir, sampai 40 sentimeter atau sedengkul biasanya," ujarnya.

Sementara itu, Kabid Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air (DPUBMSDA) Rizal Asnan menyatakan bahwa perencanaan betonisasi di jalan Desa Tropodo sudah mulai dilakukan. "Nanti semoga tahun ini di desa itu ada pengerjaan betonisasi 900 meter dan pembangunan drainase," tuturnya. (eza/c14/any)

Jawa Pos



Jalan rusak akibat galian pipa pdam di Jumputrejo

IMBAS PROYEK PEMASANGAN PIPA PDAM, JALAN DI DESA JUMPUTREJO RUSAK PARAH

Sidoarjo, Pojok Kiri

Lebih dari tiga bulan, ruas jalan di Dusun Keling Desa Jumputrejo, Kecamatan Sukodono, rusak parah. Menurut Warga, kerusakan itu akibat adanya pengerjaan proyek pemasangan pipa milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Dari pantauan awak media Pojokkiri di lapangan, Rabu (12/04/2023), sekitar pinggiran jalan raya Dusun

Keling, Desa Jumputrejo, Sukodono ini memang terdapat bekas galian. Jalannya rusak, berlobang dan tidak rata.

Mujiadi, salah seorang warga RT 16 /RW 05 dusun Keling saat mengurug jemplong jalan di sekitar mengatakan, sudah sekitar Tiga bulanan kondisi ruas jalan itu sudah rusak. Awal mulanya di ruas jalan itu ada pengerjaan penggalian untuk memasang pipa PDAM.

Setelah digali oleh pihak pekerja dari rekanan PDAM kemudian diurug lagi. Tapi, ya begitu gak rata ngurugnya, sehingga menjadi bergelombang dan jemplong. Ungkap Mujiadi. Rabu(12/04/2023).

Ditempat terpisah Kades Jumputrejo, Widarto saat dikonfirmasi Pojokkiri Rabu (12/4/2023) di Ruang kerjanya membenarkan kalau di desa Jumputrejo habis

ada pengerjaan galian Pipa PDAM. Sebenarnya saya senang ada pembangunan yang ada di desa. Tetapi setelah melakukan pekerjaannya seperti galian di ruas tepi jalan tolong di rapikan lagi dan diperbaiki lagi. Tiap hari pengguna jalan cukup padat, karena jalan di dusun Keling merupakan jalan alternatif dari Sidoarjo menuju Surabaya. Jelas Kades. Lanjut Widarto, saat hujan, kondisi

jalan di sana semakin parah. Jalanan yang berlubang tertutup air, sehingga pengendara yang melintasi tidak tahu mana yang lubang dan tidak. Hal itu bakal menjadi salah satu penyebab orang terjatuh saat melintas.

Kades Widarto berharap, dinas terkait cepat memperbaiki jalan kondisi jalan yang telah rusak imbas dari galian Pipa PDAM tersebut. (dy/khol)

Dipindai dengan CamScanner

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PENYERAHAN BANTUAN: Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor menyerahkan Bantuan Langsung Tunai/BLT yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau/DBHCHT tahun 2023 kepada buruh pabrik rokok. Penyerahan dilakukan di Pabrik Rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu, (12/4).

3.383 Buruh Pabrik Rokok di Sidoarjo Terima BLT dari DBHCHT

BERKAH bulan Ramadhan dirasakan 3.383 buruh pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Ribuan buruh yang berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo itu, menerima Bantuan Langsung Tunai/BLT dari Pemkab Sidoarjo.

Bantuan tersebut berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2023 yang diterima Kabupaten Sidoarjo. Mereka menerima BLT tiga bulan sekaligus. Mulai bulan Januari, Februari dan Maret. Besarnya Rp. 275 ribu perbulan.

Penyerahan BLT DBHCHT tersebut dilakukan Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor S.IP di Pabrik Rokok Cengkir Mas Tanggulangin, Rabu, (12/4). Selain buruh pabrik rokok, bantuan tersebut juga diserahkan kepada 154 orang penerima nonproduksi pabrik rokok. Anggarannya kurang lebih mencapai Rp. 11 miliar.

Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor menyampaikan bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakatnya. Bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mensejahterakan warganya. Dikatakannya terdapat kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya. Dari 2ribuan orang, kini sudah mencapai 3ribu orang. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban panjengnan semua," ucapnya.

Dikatakannya, upaya pemkab mensejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan seperti ini. Pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Sidoarjo. Seperti halnya pelatihan yang diberikan kepada buruh pabrik rokok agar memiliki keterampilan kerja lainnya. "Lewat Disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok sehingga lebih produktif agar menjadi seorang entrepreneur di rumah masing-masing," ujarnya.

Dikatakannya, keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada industri rokok. Keberpihakan itu untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut. Pemkab Sidoarjo sendiri berencana membuat Kawasan Industri Hasil Tembakau/KIHT. Tempatnya di wilayah Kecamatan Porong. Tempat tersebut menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnisnya.

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT dikawasan Porong yang akan mewadahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya," ucapnya. (adv/udi)



Bupati Sidoarjo H. Ahmad Muhdlor



SEBANYAK 3.338 KARYAWAN PABRIK ROKOK MENERIMA BLT - DBHCHT DARI PEMKAB

Sidoarjo, Pojok Kiri

Menjelang lebaran hari raya idul fitri 1444 H Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyalurkan BLT - DBHCHT (Dana Bantuan Langsung Tunai Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) kepada ribuan karyawan pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo. Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan Total jumlah penerima BLT - DBHCHT sebanyak 3.338 karyawan.

Bantuan yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT)

tahun 2023, secara simbolis diserahkan langsung Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada para karyawan pabrik rokok Cengkir Mas Tanggulangin dengan Nominalnya Rp. 275.000/bulan mulai Januari - Maret dengan total Rp. 825.000, dengan Anggaran yang digelontorkan oleh pemkab kurang lebih mencapai Rp. 11 milyar.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyampaikan "kami dapat perintah dari pemerintah pusat, semua bantuan sosial harus di turunkan sebelum hari raya, seperti BLT - DBHCHT,

harus dipercepat karena ada kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya, Dari 2.296 orang, kini mencapai 3.338 orang dan ada 153 penyokongnya seperti sopir dan sebagainya, karena bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah untuk mensejahterakan warga" ucapnya Rabu (12/4).

"Pemerintah punya atensi lebih, keberpihakan lebih untuk menjaga ekosistem yang baik, baik ekosistem ekonomi, sosial dan ekosistem kemasyarakatan terhadap industri rokok bagaimana semua pihak di

untungkan dan semua pihak mendapat perhatian sehingga semua pihak dapat berjalan tanpa menggantungkan dengan yang lainnya, karena ini sebagai tugas kita bersama" Tambahnya.

"Termasuk Dari menteri Sosial menggelontorkan 276.000 kemas beras 10 kg kepada masyarakat baik by Name dan by adres sudah ada dan di bagi menjadi 3 bulan, jadi menteri sosial perbulan menggelontorkan hampir 92.000 lebih, dan itu sudah tersebar sebelum hari raya, dan harus kita kawal secara bersama-sama" Urainya.



"Terkait ketahanan pangan, terkait kestabilan harga terkait pengendalian inflasi,

pemerintah punya komitmen yang besar agar hari raya nanti berlangsung dengan

nyaman, tertib dan tidak ada lonjakan harga yang signifikan" Pungkasnya. (Nang)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



DARYANTO/DUTA

Ketua PC Muslimat NU Sidoarjo, Hj. Ainun Jariyah saat memberikan sembako kepada ojol perempuan dikantor setempat, Kamis (13/4).

PC Muslimat NU Ajak Ojol Pengajian, Diberi Bingkisan Sembako serta Uang

DUTA

SIDOARJO - Di akhir sepuluh hari ke-3, PC Muslimat NU Sidoarjo menggelar pengajian dengan puluhan ojol perempuan di kantor Muslimat Sidoarjo, Kamis (13/4). Dalam kegiatan itu, PC Muslimat NU Sidoarjo juga menyerahkan bingkisan sembako serta uang dan baju gratis kepada ojol perempuan Gaspol.

Ketua PC Muslimat NU Kabupaten Sidoarjo Hj. Ainun Jariyah mengaku sangat terharu dengan pengajian buat Perempuan Ojek Online bertajuk "Ayo Ngaji Bareng Gaspol/Gerakan Sayang Perempuan Ojek Online".

Hj Ainun menyampaikan, pengajian ini sangat dibutuhkan buat perempuan driver online dan Muslimat NU sangat peduli terhadap perempuan-perempuan ini untuk belajar mengaji.

"Driver perempuan online ini harus dibina dan dirangkul, mereka pemimpin dalam ru-

mah tangganya yang mungkin suaminya sakit atau tidak bekerja imbas PHK yang harus kita bantu untuk belajar mengaji, mereka sudah mau menjalankan perintah Allah dan mau mengubah nasib meskipun mempunyai kewajiban sebagai driver online," jelas anggota DPRD Sidoarjo Fraksi PKB ini.

Acara ini selain bernuansa Islami dan membudayakan nilai-nilai positif dalam agama, Hj Ainun berharap agar silaturahmi tetap terjaga dengan baik dan bisa membentuk menjadi driver yang santun dan beretika.

Salah satu anggota Gaspol Nita mengatakan, dengan adanya pengajian bagi driver perempuan online ini, dapat membina rohani dan menambah ilmu agama baginya. Apalagi sebagai perempuan yang seharusnya di rumah, harus bekerja karena suami sakit untuk membiayai keluarga. ● dar



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

92.685 Warga Terima Bantuan Beras

SIDOARJO – Pemkab Sidoarjo sampai saat ini terus menyalurkan bantuan beras bagi 92.685 warga tidak mampu. Penyaluran sudah mencapai 50 persen. Targetnya, sebelum Lebaran, penyaluran tuntas 100 persen.

Kemarin (13/4) distribusi bantuan dilakukan di empat desa di Kecamatan Krembung. Yakni, di Desa Wonomlati, Desa Rejeni, Desa Wangkal, dan Desa Ploso. Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menyalurkan beras secara langsung. Sebelumnya, Muhdlor juga memberikan bantuan di kecamatan lain. Di antaranya, di Kecamatan Balongbendo dan Keca-

matan Porong.

Muhdlor menyampaikan, ada 276 ribu karung beras yang dibagikan. Pihaknya turut mengawal pembagian untuk memastikan bantuan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Sidoarjo Misbahul Munir menyebut bantuan tersebut sebagai bantuan itu disalurkan pada tahun ini selama tiga bulan. Yaitu, untuk Maret, April, dan Mei.

Misbah menyatakan, penerima bantuan tersebut adalah warga miskin yang terdata dalam penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan nontunai (BPNT). (uzi/c14/any)

Jawa Pos



DIMAS MALULANA/JAWA POS

BANTUAN PANGAN: Warga mengambil bansos beras di Balai Desa Wonomlati, Kecamatan Krembung, kemarin.

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jelang Lebaran 3.383 Buruh Pabrik Rokok Digelontor BLT

Bupati Sidoarjo: Upaya Pemerintah Sejahterakan Warga

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR

Sidoarjo, Memorandum

Menjelang Hari Raya Idulfitri 1444 H Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali menggelontorkan BLT (bantuan langsung tunai) kepada ribuan buruh pabrik rokok di Kabupaten Sidoarjo.

Mereka yang tercatat sebagai penerima BLT itu berasal dari 53 pabrik rokok yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Total jumlah penerima BLT sebanyak 3.383 buruh. Bantuan itu berasal dari dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) tahun 2023.

Nominalnya Rp 275 ribu per bulan. Rincian BLT yang diberikan mulai Januari, Februari, dan Maret dengan total Rp 825 ribu. Rabu (12/4) BLT secara simbolis diserahkan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali kepada para buruh Pabrik Rokok Cengkir Mas Tanggulangin.

Selain buruh pabrik rokok, bantuan tersebut juga diserahkan kepada 154 orang penerima nonproduksi pabrik rokok. Anggaran yang digelontorkan kurang lebih mencapai Rp 11 miliar.

Bupati menyampaikan bantuan seperti ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Bantuan tersebut kata Gus Muhdlor panggilan akrab Bupati Sidoarjo menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menyejahterakan warga.

Dikatakan Gus Muhdlor terdapat kenaikan penerima bantuan dari tahun sebelumnya. Dari 2 ribuan orang, kini sudah mencapai 3 ribu orang. "Semoga bantuan ini bisa meringankan beban *panjenengan* semua," ucap bupati.

Putra KH Agoes Ali Masyhuri, pengasuh Ponpes Progresif Bumi Sholawat itu mengatakan upaya Pemkab Sidoarjo menyejahterakan warganya tidak hanya dilakukan melalui bantuan saja.

Lebih dari itu pelatihan menjadi pengusaha baru juga terus dilakukan Dinas Tenaga Kerja Pemkab Sidoarjo. Seperti halnya pelatihan yang diberi-



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali foto bersama para buruh Pabrik Rokok Cengkir Mas Tanggulangin setelah acara penyerahan BLT sebagai bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat.



Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali secara simbolis menyerahkan BLT kepada buruh Pabrik Rokok Cengkir Mas Tanggulangin.

kan kepada buruh pabrik rokok agar memiliki keterampilan kerja lainnya.

"Lewat disnaker juga kita sertakan pelatihan untuk buruh rokok sehingga lebih produktif agar menjadi seorang *entrepreneur* di rumah masing-masing," sebut Gus Muhdlor.

Menurut bupati muda itu, bentuk keberpihakan pemerintah juga diberikan kepada industri rokok. Keberpihakan tersebut untuk menjaga ribuan orang yang menggantungkan hidupnya pada industri tembakau tersebut.

Saat ini Pemkab Sidoarjo sedang

membuat kawasan industri hasil tembakau (KIHT). Tempatnya di wilayah Kecamatan Porong. lokasi tersebut menjadi wadah pengusaha rokok untuk lebih tenang menjalankan bisnisnya.

"Keberpihakan pemerintah baik dari pemerintah pusat maupun daerah terkait dengan penggunaan DBHCHT sangat masif, termasuk komitmen kita untuk membangun KIHT di wilayah Porong yang akan mewadahi pengusaha-pengusaha rokok agar lebih tertib dan aman menjalankan usahanya," pungkas bupati. (kri/jok/nov)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



LOETIF/DUTA

DILARANG: Kepala Puskesmas Gedangan Gedangan, dr. Barbara Irawaty.

Butuh Sinergi Pemkab dan Pemdes

DUTA

SIDOARJO - Menjadi perhatian pemerintah pusat, khususnya pemerintah Kabupaten Sidoarjo seperti disampaikan Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor saat memperingati hari Gizi

Nasional stunting di Sidoarjo masih ada dan masih meningkat 1,3%. Penangan stunting ditingkat Desa menjadi attensi khususnya oleh Puskesmas.

Seperti disampaikan terkait stunting di Desa, Kepala Puskesmas Gedangan, dr. Barbara Irawaty, kepada *duta.co* saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (13/4/23) menjelaskan, Puskesmas Gedangan dalam upaya menuntaskan stunting melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya seperti beberapa waktu kemarin, setelah melakukan advokasi sinergi pada tingkat Kecamatan dan Pemdes:

“Namun tidak hanya itu saja, lanjut kegiatan yang bersinggungan dengan kader selaku ujung tombak di masyarakat yang melaksanakan kegiatan penimbangan dan input data pada Balita, guna pencegahan dini,” jelas dr. Ira biasa disapa.

Masih kata dr. Ira melanjutkan seperti kegiatan yang baru-baru ini pelaksanaan kegiatan validasi dan evaluasi gizi dan KIA pada (1/3/23) kemarin di aula Puskesmas Gedangan dihadiri oleh seluruh kader desa di wilayah Puskesmas Gedangan.

Saya berharap dan berpesan, untuk ini diperlukan kerja sama dan kerja ikhlas serta kepedulian seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat.

“Dalam mencegah stunting di kecamatan Gedangan khususnya, dan pemerintah kab Sidoarjo pada umumnya. Bersama bersatu untuk masa depan anak bangsa,” pungkas mantan Kepala Puskesmas Wonoayu tersebut. ● **loe**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DISPERINDAG



LIPSIAN ALFIRIDIPADAR SIDOARJO

DIBINA: Para pedagang pancakan di Pasar Larangan berjualan di luar stan pasar.

Penertiban Pedagang Pasar Diminta Tegas

KOTA-Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Sidoarjo diminta tegas dalam menertibkan pedagang pancakan Pasar Larangan. Hal tersebut disampaikan sejumlah anggota Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Sidoarjo saat hearing bersama anggota DPRD Sidoarjo, Kamis (13/4).

Sesepuh pedagang Pasar Larangan, Abdul Hadi mengatakan, Disperindag harus tegas dalam menertibkan pedagang pancakan tersebut. Sebab jika dibiarkan, khawatir ke depannya konflik antarpedagang pecah hingga menimbulkan bentrok.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

“Jangan sampai pedagang yang ada di luar dengan yang di dalam ini bentrok. Bukan kenapa kami sebagai sesama ini nantinya yang repot,” katanya.

Sejatinnya, lanjut Hadi, penataan yang telah dilakukan sebelumnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Hanya saja setelah sekitar satu jam, setelah ditertibkan, pedagang kembali lagi. “Setelah disapu dan bersih, malam balik lagi,” imbuhnya.

● Ke Halaman 10



Penertiban Pedagang...

Sehingga diperlukan pengawasan agar hal serupa tak terulang kembali. Hadi mengaku siap untuk mengakomodir para pedagang jika penertiban benar-benar dilakukan. “Kalau nanti ada apa-apa kami akan bertanggungjawab,” tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudori mengatakan, stan di dalam pasar banyak yang tak terpakai. Sehingga jika tak ada penegakan, maka akan sulit. Kuncinya, dibutuhkan konsistensi dalam melakukan penegakan.

Selain itu, kebijakan penataan tersebut juga harus berkesinambungan. Paling tidak, kata Dhamroni, setelah pemindahan dilakukan, diperlukan

kebijakan lainnya. Misalnya saja dengan melakukan rekayasa lalu lintas dan sebagainya.

“Tolong konsepnya dalam menyusun penataan dan pembinaan tersebut harus jelas dan paripurna. Syukur-syukur kalau nantinya kami juga diajak bicara,” kata Dhamroni.

Kabid Pasar Disperindag Sidoarjo Hudi Prasetyo mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan tempat relokasi. Lokasinya berada di sebelah barat dan di dalam pasar. Jumlahnya juga lebih dari jumlah pedagang pancakan.

Sayangnya, para pedagang pancakan itu enggan untuk menempati stan di dalam. Hudi menyebut, dari hasil analisa yang dilakukan, para pedagang pancakan itu sudah menempati posisi atau kelas ekonomi atas. (far/vga)

cs Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Muhdlor: SPPT PBB-P2 Lewat Virtual Mudahkan Masyarakat

KOTA-Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo mulai menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (SPPT PBB-P2) tahun 2023. Caranya, melalui kanal virtual berbasis WhatsApp dan email. Proses penyampaian itu dilakukan

Penyampaian SPPT virtual ini lebih cepat dan tepat diterima masyarakat dibandingkan dengan penyampaian SPPT secara manual melalui desa atau kelurahan ataupun petugas."

AHMAD MUHDOR
Bupati Sidoarjo

secara bertahap dan sudah dilakukan mulai Januari 2023 lalu.

Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor mengatakan, mekanisme penyampaian ini bisa dikatakan lebih cepat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dimana pada tahun 2022 SPPT PBB-P2 baru tersampaikan kepada ma-

sarakat pada Maret-April setiap tahunnya.

"Penyampaian SPPT virtual ini lebih cepat dan tepat diterima masyarakat dibandingkan dengan penyampaian SPPT secara manual melalui desa atau kelurahan ataupun petugas," ujarnya.

Terobosan yang dilakukan BPPD Sidoarjo itu, kata

Muhdlor, tujuannya untuk memudahkan masyarakat. Ke depan penyampaian semua SPPT PBB-P2 disampaikan lewat virtual.

"Masyarakat harus dimudahkan dalam menerima SPPT PBB P2," jelas bupati yang akrab disapa Gus Muhdlor itu.

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



Muhdlor: SPPT PBB-P2...

Sementara itu, Kepala BPPD Sidoarjo Ari Suryono mengatakan, pihaknya sudah merencanakan menerapkan penyampaian SPPT PBB P2 secara virtual kepada seluruh masyarakat.

"Seperti yang diminta Pak Bupati, tahun 2024 seluruh masyarakat Sidoarjo yang memiliki, menguasai, memanfaatkan objek PBB di wilayah Sidoarjo dapat menerima SPPT PBB P2 secara virtual," jelas Ari.

Mantan Kepala DPMPSTP Sidoarjo itu menjelaskan, untuk mempercepat realisasinya ia meminta kepada ma-

sarakat untuk mendaftarkan nomor WhatsApp dan email melalui form yang bisa diakses lewat link berikut: https://s.id/Pendataan_PBB_SDA.

"Bagi masyarakat yang memiliki lebih dari satu objek pajak dapat dilakukan pendaftaran sekaligus meskipun berbeda kecamatan selama masih berada di ruang lingkup wilayah Kabupaten Sidoarjo," ungkapnya.

Menurut Ari, nama SPPT PBB-P2 yang didaftarkan pun tidak harus sama dengan nama pendaftar atau pemohon. Oleh karena itu masyarakat diharapkan dapat segera melakukan pendaftaran tersebut karena

penyampaian SPPT akan secara penuh dilakukan melalui WhatsApp. Tidak lagi diantarkan oleh petugas BPPD Sidoarjo maupun pihak desa atau kelurahan.

BPPD Sidoarjo, kata Ari, terus berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan kepada para wajib pajak. Khususnya dalam pelayanan mempermudah pembayaran pajak daerah.

Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor BPPD untuk membayar pajaknya. Sebab, pembayaran sudah dapat dilakukan melalui berbagai kanal pembayaran secara online maupun offline.

CS Dipindai dengan CamScanner



Propemperda Direvisi, Jumlah Raperda Bertambah

KOTA-Legislatif dan eksekutif menyetujui perubahan program pembentukan peraturan daerah (propemperda) 2023 pada rapat paripurna yang digelar Rabu (12/4) malam. Dari perubahan tersebut, jumlah raperda yang akan dibahas tahun ini bertambah.

Sebelumnya, pada November 2022 lalu sudah disetujui ada 23 raperda yang masuk dalam propemperda 2023. Rinciannya, enam raperda usulan legislatif dan 17 raperda usulan eksekutif.

Sekretaris DPRD Sidoarjo Hari Sucahyono mengatakan, dalam perubahan propemperda 2023, jumlah raperda menjadi 24. Enam dari usulan legislatif dan 18 dari eksekutif. Pada usulan legislatif, empat di antaranya merupakan usulan dari Komisi D. Salah satunya adalah raperda fasilitasi penyelenggaraan pesantren.

"Sisanya ada satu usulan Komisi C dan satu lagi usulan Komisi S," katanya.

Sedangkan raperda usulan dari eksekutif berasal dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti raperda pengarusutamaan gender yang diusulkan oleh Dinas



FOKUS: Suasana rapat paripurna membahas tentang perubahan propemperda 2023.

Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Kemudian raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang diusulkan oleh Dinas Perumahan, Permukiman,

Cipta Karya, dan Tata Ruang (DP2CKTR).

Ketua DPRD Sidoarjo Usman yang memimpin rapat paripurna menjelaskan, ada beberapa hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam

melakukan perubahan propemperda 2023. Dia menyebutkan, propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah yang disusun secara berencana, terpadu

dan sistematis.

Secara operasional, propemperda memuat daftar rancangan peraturan daerah yang disusun berdasarkan metode dan parameter

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



Propemperda Direvisi,....

tertentu. Perubahan propemperda yang disampaikan telah melalui proses pengkajian yang melibatkan pihak terkait dari berbagai lini. Dengan tetap

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Selanjutnya perubahan propemperda ini akan ditentukan kembali sesuai dengan skala prioritas untuk dibahas bersama," katanya. (nis/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner



Lomba Literasi Anak

Tumbuhkan Kecerdasan Melalui Membaca dan Bercerita

Ada banyak cara yang bisa dilakukan agar minat baca siswa tumbuh. Misalnya dengan menggelar lomba literasi. Setidaknya hal itu yang dilakukan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo.

LUKMAN AL FARISI, Wartawan Radar Sidoarjo

SIANG itu, Maulany Chury Asyim terlihat mulai membuka sebuah komik. Wajahnya tampak fokus membaca baris demi baris cerita di dalamnya. Chury hanya diberi waktu sekitar 15 menit untuk membaca dan lima menit untuk mengingat.

Tak lama, siswi yang duduk di bangku kelas V Madrasah Ibtidaiyah itu pun dipanggil dua dewan juri. Dia diminta untuk bercerita tentang kisah dalam komik yang dibacanya tersebut. Sontak saja,



TEGANG: Salah satu peserta lomba menceritakan kembali buku yang dibacanya disaksikan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo Ridho Prasetyo dan Owner Yussar Fishing and Playground, Zahlul Yussar.

wajahnya tiba-tiba terlihat tegang. "Yang saya baca tadi tentang kebersihan di komik. Sedikit sulit karena waktunya juga singkat hanya 15 menit. Agak deg-degan

dan gerigi juga," ujarnya.

Chury mengaku belum sempat mengulangi bacaan komik tersebut. Sehingga dia juga tak sempat untuk melakukan gerakan saat mencerita-

kan kisah dalam komik itu.

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo Ridho Prasetyo mengatakan, kegiatan itu memang digelar agar minat baca anak tumbuh. Sebab dari suka membaca, maka kecerdasan pada anak akan tumbuh. Kegiatan berlangsung di Yussar Fishing and Playground, Tanggulangin.

"Ini kami gelar untuk memberikan fasilitas kepada anak-anak untuk meningkatkan kecerdasannya," terangnya.

Menurut Ridho, anak yang suka membaca dari buku cerita, maka nantinya akan mulai menyukai untuk membaca buku-buku pelajaran. Sehingga rangsangan awalnya berasal dari buku cerita. "Sehingga ini menjadi penting," katanya.

Kegiatan tersebut diikuti siswa kelas IV dan V SD sederajat dari 18 kecamatan. Totalnya ada 88 peserta

● Ke Halaman 10

CS Dipindai dengan CamScanner



Tumbuhkan Kecerdasan...

yang berasal dari 46 sekolah. Uniknya, seluruh peserta lomba literasi tersebut akan mendapatkan e-Sertifikat.

"Semua peserta kami kumpulan, mereka akan menuju juri yang ditentukan, kemudian membaca buku yang sudah ditentukan, setelah itu mereka akan menceritakan apa yang mereka baca," jelasnya. (*/vga)

CS Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

✓ ■ SOSIAL



Dalam: Harian Radar Sidoarjo

PEDULI: Ketua TP PKK Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor saat memberikan motivasi kepada para penghuni Liponsos.

TP PKK Sidoarjo Baksos ke Liponsos

KOTA-Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo bersama dengan Dharma Wanita Persatuan menggelar bakti sosial ke Lingkungan Pondok Sosial (Liponsos) Sidoarjo. Kegiatan rutin TP-PKK Sidoarjo tersebut sebagai program kepedulian di bulan suci Ramadan.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sidoarjo Sa'adah Ahmad Muhdlor didampingi Ketua Dharma Wanita Persatuan Sidoarjo Ary Andjar Surjadianto menerangkan, kegiatan penyerahan bantuan sosial ini juga berkolaborasi dengan Koperasi Wanita (Kopwan) Deltasari.

“Sebelumnya kita sudah berkoordinasi dengan Pak Kadinsos, tentang apa saja yang dibutuhkan. Jadi penyerahan seperti matras, makanan jadi, sembako dan juga alat mandi sudah kita serahkan hari ini (kemarin, red),” ujar Sa'adah.

Di hadapan para penghuni Liponsos khususnya para lansia, Sa'adah

● Ke Halaman 10



TP PKK Sidoarjo...

memberikan semangat untuk menjalani hidup lebih baik lagi. Menurutnya, Pemkab Sidoarjo terus mengupayakan yang terbaik dan terus memperhatikan para penghuni Liponsos yang dinaungi Dinas Sosial Sidoarjo tersebut.

“Tentu pesan saya untuk para tenaga Dinsos di Liponsos ini terus semangat untuk merawat lansia serta ODGJ yang ada. Dan harapannya, mudah-mudahan ke depan ada banyak lagi donatur yang mau menyumbangkan keperluan yang diperlukan oleh liponsos,” ungkapnya. (nul/vga)

cs Dipindai dengan CamScanner





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Tertibkan Pasar Larangan Sidoarjo, Pedagang Minta Pemkab Tidak Perlu Takut



SIDOARJO, KEMPALAN – Rapat dengar pendapat (*hearing*) antara Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kabupaten Sidoarjo bersama pimpinan DPRD, Disperindag Kabupaten Sidoarjo, serta Satpol PP Sidoarjo juga memunculkan pertanyaan besar. Sebenarnya, Pemkab Sidoarjo punya atau tidak konsep penataan pasar yang bagus. Bagaimana mengelola pasar secara teratur, aman, tertib, dan bersih.

"Kami ingin tahu, konsep disperindag seperti apa. Konsep pasar tradisional bernuansa modern. Konsep seperti itu menjadi awal dari pelayanan di pasar," kata Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Damroni Chudori yang menerima perwakilan pedagang di kantor DPRD bersama Wakil Ketua DPRD Emir Firdaus dan H Kayan serta Ketua Komisi B Bambang Pujiyanto pada Kamis siang (13/4).

Kepala Bidang Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo Hoedy Prasetyo menjelaskan bahwa penataan pedagang mengacu pada Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Penataan, Pengelolaan, dan Pemberdayaan Pasar Rakyat.

kempalan

Intinya, disperindag tidak bisa melarang pedagang yang berjualan di luar pasar rakyat. Dengan catatan, pedagang itu tidak mampu mengganti tempat jika ada ruang di dalam pasar. Pengelola pasar selalu mengidentifikasi bahwa mereka adalah masyarakat prasejahtera. Namun, kebijakan itu selalu dievaluasi. Kalau sudah naik kelas dan mampu, mereka bisa mengganti ruang yang kosong di dalam pasar.

Khusus untuk pedagang Pasar Larangan yang diminta ditertibkan, lanjut Hoedy, mereka telah distapi tempat di barat pasar. Sudah ditata. "Sudah kita ingatkan, kalau susah ditata dan ditangani APH (aparatus penegak hukum), kami tidak akan memfasilitasi," jelas Hoedy.

Untuk proses penertiban pun, tambah dia, tahapan-tahapan sudah dilaksanakan. Bahkan, persiapan sudah sampai rencana pasca penertiban. Pedagang yang berjualan di bagian luar sudah diedukasi berkali-kali. Namun, mereka bertahan seakan-akan tidak bisa dipindah. Ada yang meng-endorse, tapi sepihak. Bahkan, ada ormas-ormas yang mendukung. Macam-macam. Ada LSM juga. Dibutuhkan tindakan yang benar-benar kuat.

Abdul Hadi, pengurus dan sesepuh HPP dan Pasar Larangan berharap disperindag, satpol PP, dan pihak-pihak lain tidak perlu khawatir jika ingin menertibkan pedagang tidak resmi di Pasar Larangan. Tidak perlu takut. Dia mengaku sudah pernah menanyai para pedagang yang berjualan di sisi timur Pasar Larangan. Rata-rata mereka tidak keberatan pindah.

Banyak di antara para pedagang itu, lanjut Hadi, masih bersaudara dengan dirinya. Ada pernah ponakan, anak, dan cucu yang berjualan di dalam maupun di luar pasar. Dia yakin semua mau menurut kepada pemerintah.

"Ya 75 persen bilang mau pindah. Kenapa tidak juga ditertibkan," ungkapnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Karena itu, para pedagang Pasar Larangan dan HPP Kabupaten Sidoarjo benar-benar berharap segera ada kepastian. Waktu penertiban harus cepat ditentukan. Jadi, hasil pertemuan antara HPP dan DPRD ini bisa disampaikan kepada pedagang yang sudah menunggu-nunggu.

Kabid Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibum Tranmas) Satpol PP Kabupaten Sidoarjo Yani Setiawan yang diberi kesempatan berbicara menyatakan pihaknya sudah siap melaksanakan perintah penertiban. Satpol PP sudah melakukan proses dan komunikasi dengan berbagai pihak. Jajaran samping seperti TNI dan Polri akan diibatkan.

Persoalannya, kegiatan penertiban itu belum disipi anggaran. Penertiban itu juga harus melalui proses dan mekanisme. Yani berharap ada diskresi anggaran dalam APBD untuk penertiban. "Kami harapkan ada diskresi dan dukungan DPRD untuk itu," ungkapnya.

Mendengar itu, sesepuh HPP Pasar Larangan Abdul Hadi menyatakan dirinya siap meminta urunan pedagang untuk membantu biaya penertiban. "Kami siap narik untuk biaya penertiban. Biar cepat," ungkapnya.

Dia juga meyakinkan bahwa tidak akan ada apa-apa jika penertiban dilakukan. Pemerintah jangan takut pada organisasi masyarakat (ormas). "Pokok tegas, yakin mboten wonten nopo-nopo (Yang penting tegas. Yakin tidak akan ada apa-apa)," tutur Abdul Hadi.

Wakil Ketua DPRD Emir Firdaus menegaskan penertiban pedagang tidak resmi di Pasar Larangan harus segera dilakukan. Legislator asal PAN itu menyatakan mendukung disperindag untuk melakukan penertiban dengan melibatkan Polri dan instansi lain. Dia mendesak hari itu juga (kemarin, red) sudah ada kesepakatan. Negara ada hukumnya. Ada sturannya. Sebab, di pasar-pasar lain juga bermunculan pedagang yang berdagang di luar tempat yang seharusnya.

"Kami siap tanda tangan untuk mendukung penertiban" ujarnya.

kempalan

Ketegasan Emir itu pun didukung peserta *hearing*. Masing-masing perwakilan pedagang menandatangani notulen rapat tentang rencana penertiban pedagang di Pasar Larangan. Baik perwakilan *disperindag*, *satpol PP*, *DPRD*, maupun para pedagang. (F. rozi)

kempalan



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Usman Awasi Distribusi Bantuan Beras di 5 Desa



Sidoarjo – cakrajatim.com: Ketua DPRD Sidoarjo, H Usman, di Balai Desa Kemiri, Buduran, Kamis (13/4) tadi, mengawasi distribusi pembagian beras bantuan dari Kementerian Sosial. Usman dalam menjalankan fungsi pengawasannya ingin mengetahui langsung kelayakan penerima bantuan. “Nek gawe gelang teng kroncong yo gak layak dapat bantuan,” Ujarnya di depan warga desa Kemiri. Namun ia bersyukur, bantuan ini memang jatuh kepada warga yang memang berhak menerima.

Sidoarjo, menjadi kewajiban dewan untuk mendukung.

Di depan warga Kemiri, Usman berharap untuk mencintai bupati Muhdlor. Bupati muda ini gigih membangun dan memperbaiki keadaan rakyatnya. “Kalau baik, perlu dipilih lagi jadi bupati untuk periode kedua,” tuturnya.

Sebagai wakil rakyat, ia menegaskan menjalankan fungsi pengawasan dalam distribusi bantuan beras warga miskin.

Kesibukan dalam satu hari ini, Usman melakukan kesalahan pengawasan distribusi di desa Pager Wojo, Suko, Buduran, Kemiri.

Kabid Dinsos Sidoarjo, Basori, mengutarakan, bantuan beras sumber anggarannya dari APBN yang disalurkan melalui kerjasama Bulog dan kantor pos. Data penerimanya sudah ada.

Seluruh bantuan beras ini diharapkan selesai pada bulan Ramadhan. “Tujuannya menekan inflasi. Biasanya harga naik menjelang lebaran. Karena itu strateginya distribusi dituntaskan hingga akhir ramadhan,” Ujarnya. (hd)

➡ **CakraJatim.com**



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Jalan Tarik Tak Kunjung Diperbaiki, BPD Singogalih: Jangan Ngedabrus Pak Bupati



Kondisi jalan di wilayah Desa Singogalih Kecamatan Tarik
yang diambil Kamis (12/04/2023) siang tadi

DNN, SIDOARJO – Warga Desa Singogalih Kecamatan Tarik mengaku sudah lelah menunggu janji-janji bupati Sidoarjo yang tak kunjung terealisasi untuk membangun jalan di wilayah desa mereka yang rusak parah sejak lebih dari setahun yang lalu.

"Kami menagih janji, kapan jalan ini dibetonisasi. Jangan ngedabrus (omong kosong-red)," tandas anggota BPD Singogalih, Budiono yang ditemui usai menggelar acara buka puasa dan di salah satu rumah warga desa setempat, Rabu (11/04/2023) sore kemarin.

Dijelaskannya, saat melakukan kunjungan ke desa tersebut beberapa waktu lalu, Bupati Sidoarjo, Ahmad Muhdlor berjanji akan mempercepat proses revitalisasi jalan berlubang sejauh 2,7 km yang membentang dari Desa Tarik ke Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik.

Saat itu bupati yang akrab dengan panggilan Gus Muhdlor itu menargetkan proses lelangnya bisa dituntaskan pada pertengahan April. Namun faktanya hingga saat ini pihak Pemkab Sidoarjo belum merilis pengumuman lelang tender pembangunan jalan tersebut di situs lps.sidoarjokab.go.id.

Lebih lanjut Budiono mengatakan, upaya darurat yang dilakukan Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air (BMSDA) Sidoarjo untuk mengurug lubang-lubang menganga di ruas jalan itu dengan basecourse atau kerikil pada awal Maret lalu hanya bertahan kurang dari sebulan.



Karena terus tergujur air hujan dan dilintasi kendaraan berat yang berlalu-lalang setiap harinya, material itupun terangkat sehingga kembali menimbulkan lubang-lubang di jalan yang membahayakan pengendara kendaraan bermotor, khususnya roda du

|



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

DPC PKB Sidoarjo Memberikan Reward Caleg Potensial pada Pileg 2019



SIDOARJO, CAKRAWALA.CO - DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo memberikan reward kepada 14 calon anggota legislatif atau **caleg** calon pendulang suara, meski belum beruntung pada **pemilu** 2019.

"Di momen acara konsolidasi kader pemenangan **pemilu** 2024 dan maleman saur bersama keluarga besar PKB Sidoarjo, penghargaan diberikan kepada para **caleg** potensial pada **pemilu** 2019 yang minimal memperoleh 1500 suara," Ungkap H. Syihabuddin, Ketua Lembaga Pemenangan **Pemilu** (LPP) Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Sidoarjo, Kamis dinihari 13 April 2023.

Pemberian reward **caleg** potensi **pemilu** 2019, di pendopo Ponpes Modern AL Amanah Junwangi Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. **Caleg** potensial kenapa diberi reward, masih dikatan Cak Sihab, panggilan akrab Ketua LPP PKB Sidoarjo.

Kabid Dinsos Sidoarjo, Basori, mengutarakan, bantuan beras sumber anggarannya dari APBN yang disalurkan melalui kerjasama Bulog dan kantor pos. Data penerimanya sudah ada.

Seluruh bantuan beras ini diharapkan selesai pada bulan Ramadhan. "Tujuannya menekan inflasi. Biasanya harga naik menjelang lebaran. Karena itu strateginya distribusi dituntaskan hingga akhir ramadhan," Ujarnya. (hd)

"Kebesaran sebuah partai keluarannya adalah perolehan kursi. PKB 2019 kemarin mendapatkan 16 kursi, target kita di tahun 2024 harus minimal 20 kursi. Sebagai bentuk penghargaan para **caleg** potensial membantu mendulang suara partai," katanya.

Berikut ini **caleg** potensial yang mendapatkan reward : Dapil 1. Niswatin, Habib, Basar, Dapil 2. Syihabuddin, Cak Isa, Gus Maksum, Dapil 3. Sugito Adi Saputro, Ida Purwanti, H. Faturrozi, Dapil 4. Ahmad Rifai, Dapil 5 .Abdullah Muklis, Muhajir dan Hartono, Dapil 6. Cak Wahab.

Dalam kegiatan Konsolidasi Kader Pemenangan **Pemilu 2024 PKB** Sidoarjo yang berlangsung di Ponpes Modern AL Amanah Junwangi, pembicara Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali, Ketua DPRD Sidoarjo Usman, Sekertaris **pkb**">DPC **PKB** Abdilllah Nasih, Ketua LPP **PKB pkb**">DPC **PKB** Sidoarjo Syihabuddin, Anggota Fraksi DPRD Sidoarjo diantaranya yang hadir Ainun Jariyah, Mohammad Rojik, Hamzah Purwandoyo, Moch. Dhamroni Chudlori, Rizza Ali Faizin, Iswahyudi, Pujiono, Samsul Hadi, Mochamad Bahrul Mustofa Idhom, para Baceleg **PKB**, Ketua Dewan Syuro **pkb**">DPC **PKB** Sidoarjo KH. Athoillah, Pengasuh Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi KH Nur Kholis Misbah.

Mewakili Ketua **pkb**">DPC **PKB**, H. Subandi yang tidak bisa hadir karena sakit, Sekertaris **pkb**">DPC **PKB** Abdilllah Nasih, dalam sambutannya berpesan kepada para Bacaleg **PKB**.

"Tantangan kita kedepan bukan semakin ringan tapi semakin berat namanya mempertahankannya tidak ringan. **Pemilu** tahun 2019 secara nasional **PKB** mendapatkan 9,8 persen, ekuivalen 13 juta warga Indonesia mencoblos **PKB**. Di Sidoarjo Alhamdulillah kita sudah tembus 25 persen, harapan kami kedepan bersama, seluruh komponen masyarakat agar **PKB** Sidoarjo kembali menang," Tegas Nasih.

Dalam pesanya, Abdilllah Nasih memberikan semangat ke para Bacaleg yang hadir "mlayuo sak adoh-adomu ben goleh suoro sak akeh-akeh'he, Ngopi'o sak adoh-adomu ben kon duwe konco sak akhe-akeh'he," Pesannya.

Diharapkan para Bacaleg dan pengurus **PKB** Sidoarjo, harus fight, percaya diri karena kami sebagai partai pemenang **pemilu** di tahun 2019 di Sidoarjo. "Kita punya lima modal besar bisa menang, yang pertama Aqidah Ahlussunnah wal jama'ah, kedua Sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, ketiga Kultur Sami'na wa atho'na, keempat sarana dan prasarana, kelima harus percaya diri atau PD," tutupnya.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Diduga Ada Campur Tangan Ormas dan LSM, Disperindag Sidoarjo Akui Kesulitan Tertibkan Pedagang Sisi Timur Pasar Larangan



SIDOARJO (RadarJatim.id) Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Kabupaten Sidoarjo meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo untuk bertindak tegas dalam menertibkan dan melakukan penataan terhadap pedagang disisi timur Pasar Larangan.

Hal itu disampaikan oleh Ketua HPP Kabupaten Sidoarjo, Nur Hasan Zakaria saat melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi A dan Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Sidoarjo, Kamis (13/04/2023).

Nur Hasan menyampaikan bahwa akibat tidak adanya ketegasan dari Pemkab Sidoarjo dalam melakukan penertiban terhadap pedagang disisi timur Pasar Larangan, pihaknya mengaku omset pendapatannya terus mengalami penurunan.

“Selalu ada pembiaran, bahkan dimintai restribusi oleh pengelola pasar terhadap pedagang baru yang buka lapak disisi timur Pasar Larangan,” sampainya.

Untuk itu, ia merasa tidak ada pelayanan prima dari Disperindag Kabupaten Sidoarjo karena para pembeli lebih memilih belanja dilapak-lapak sisi timur Pasar Larangan yang lokasinya berdekatan dengan jalan raya.

Selain itu, dengan adanya lapak-lapak pedagang disisi timur, secara otomatis menghalangi akses jalan bagi para pembeli untuk masuk distand-stand yang berada didalam Pasar Larangan.

“Jika kondisi ini terus dibiarkan oleh Disperindag. Jangan salahkan kami, para pedagang yang menempati stand-stand tidak membayar restribusi,” ancamnya.

Hoedy Prasetyo, Kepala Bidang (Kabid) Pasar Disperindag Kabupaten Sidoarjo menjelaskan bahwa keberadaan lapak-lapak disisi timur Pasar Larangan merupakan upaya dari Pemkab Sidoarjo untuk memberikan ruang kepada pedagang kecil berjualan disana.

Ia juga mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penertiban pedagang yang berada disisi timur Pasar Larangan, karena ada oknum dari Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang menjadi *backing*-nya.

"Kami berusaha memberikan ruang kepada masyarakat ekonomi lemah yang ingin berjualan di Pasar Larangan. Saat ini kami juga merasa kesulitan melakukan penertiban, karena ada campur tangan Ormas dan LSM," jelasnya.

H. Damroni Chudlori, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sidoarjo menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo harus tegas dan konsisten dalam melakukan penertiban serta penataan pedagang disisi timur Pasar Larangan.

Ia juga menegaskan bahwa Pemkab Sidoarjo harus membuat kebijakan yang berpihak kepada para pedagang, khususnya para pedagang yang menempati stand-stand didalam Pasar Larangan.

"Harus ada konsistensi dan ketegasan dari Disperindag, nanti dibantu oleh HPP dalam menyadarkan pedagang yang nakal," tegasnya.

Selain dihadiri oleh Ketua Komisi B, H. Bambang Pujiyanto dan anggota Komisi B, Ahmad Muzayyin. Rapat dengar pendapat tersebut juga dihadiri dua orang pimpinan DPRD Kabupaten Sidoarjo, yaitu H. Kayan dan H. Emir Firdaus. (mams)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Stan Sudah Disiapkan, HPP, Dewan, Disperindag Dan Satpol PP Sidoarjo Sepakat Tertibkan Pedagang Pancakan Pasar Larangan



HEARING - Para pengurus Himpunan Pedagang Pasar (HPP) hearing atau Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan DPRD, Komisi A, Komisi B, Disperindag dan Satpol PP sepakat penertiban pedagang Pancakan Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Kamis (13/04/2023).

Sidoarjo (republikjatim.com) - Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing yang melahirkan anggota dan pimpinan Komisi A, Komisi B serta unsur pimpinan DPRD Sidoarjo beserta pengurus Himpunan Pedagang Pasar (HPP) Sidoarjo, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dan Satpol PP Pemkab Sidoarjo menemui satu kata sepakat, Kamis (13/04/2023) sore. Mereka sepakat untuk menertibkan pedagang Pancakan yang ada di Pasar Larangan, Kecamatan Candi, Sidoarjo.

Ini menyusul stan sudah disiapkan Bidang Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo di sisi barat Pasar Larangan dan sebagian di dalam salah satu pasar terbesar di Sidoarjo itu. Namun, karena pedagang Pancakan yang dianggap bandel tidak mau ditertibkan itu didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hingga penertiban menjadi molor dan tertunda-tunda.

Karena itu, usai hearing di ruang rapat DPRD Sidoarjo itu, Disperindag Pemkab Sidoarjo diminta tegas dalam menertibkan pedagang pancakan yang ada di Pasar Larangan itu.

Salah seorang anggota HPP sekaligus sesepuh pedagang Pasar Larangan, Abdul Hadi meminta Disperindag Pemkab Sidoarjo harus tegas dalam menertibkan pedagang pancakan. Alasannya, jika dibiarkan, khawatir ke depannya konflik

antarpedagang pecah hingga menimbulkan bentrok antar pedagang di Pasar Larangan itu.

"Kami minta penertiban segera dilaksanakan. Jangan sampai pemerintah kalah dengan LSM dan Pedagang yang tidak taat pada peraturan. Kalau tidak ditindak tegas, maka kami khawatir pedagang yang ada di luar dengan yang di dalam pasar ini mala bentrok. Kalau dibenturkan antar pedagang, kami sebagai sesepuh pasar menjadi repot," ujar Abdul Hadi di tengah hearing, Kamis (13/04/2023) sore.

Bagi pria yang akrab disapa Abah Hadi ini, penataan Pasar Larangan yang telah dilakukan Disperindag Pemkab Sidoarjo sebelumnya sudah berjalan dengan lancar dan baik. Hanya saja, setelah sekitar satu jam, setelah ditertibkan, pedagang kembali lagi beroperasi di bagian depan Pasar Larangan.

"Setelah disapu dan dibersihkan, pada malam hari pedagang Pancakan itu balik lagi menempati lahannya. Karena itu harus segera ditertibkan jangan sampai peraturan pemerintah kalah dengan pedagang dan LSM yang mendampingi pedagang," ungkap Hadi.

Jika diperlukan, lanjut Hadi harus ada pengawasan. Hal ini agar kondisi serupa tidak terulang kembali. Hadi mengaku siap untuk mengakomodir para pedagang agar penertiban pedagang Pasar Larangan benar-benar direalisasikan.

"Kalau nanti ada apa-apa kami akan tanggungjawab. Saya sebagai sesepuh pedagang pasar mengetahui semua siapa saja yang berdagang di depan di dalam dan di belakang Pasar Larangan. Kalau tidak mau ambil nomor yang disiapkan Disperindag silahkan mereka berdagang diluar Pasar Larangan," tegasnya.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, M Dhamroni Chudori menilai stan di dalam pasar banyak yang tidak terpakai. Karena itu, jika tidak ada penegakan hukum dan peraturan yang berlaku maka akan sulit melaksanakan penertiban.

"Kuncinya, dalam penertiban Pasar Larangan dibutuhkan ketegasan dan konsistensi Disperidag dalam melakukan penegakan hukum. Kemudian dilanjutkan konsep penataan kalau semua pedagang sudah menempati stan di belakang dan di dalam pasar agar pembeli tetap ramai. Misalnya ada rekayasa lalu lintas. Semua kendaraan dilewatkan belakang Pasar Larangan," pintah Dhamroni.

Selain itu, kebijakan penataan ini juga harus berkesinambungan atau konsisten. Paling tidak, kata Dhamroni, setelah pemindahan dilakukan, diperlukan kebijakan lainnya. Misalnya saja dengan melakukan rekayasa lalu lintas dan sebagainya agar dagangan pedagang ini laku terjual semua.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

"Kami minta dinas membuat konsepnya. Kemudian disusun penataan dan pembinaannya juga harus jelas hingga paripurna semua. Syukur-syukur kalau nantinya kami (dewan) juga diajak bicara soal konsep penataan pedagang sampai selesai. Kalau perlu kesepakatan penertiban ini ditulis dan ditandatangani semua pihak," urai politisi PKB Senior asal Tulangan ini.

Sementara dalam hearing yang juga dihadiri pihak Disperindag dan Satpol PP Pemkab Sidoarjo ini, Kabid Pasar, Disperindag Pemkab Sidoarjo, Hoedy Prasetyo menegaskan sebenarnya pihaknya sudah menyiapkan tempat relokasi bagi para pedagang. Lokasinya berada di sebelah barat Pasar Larangan dan di dalam Pasar Larangan. Jumlah stannya juga lebih dari jumlah pedagang pancakan yang membandel tidak mau ditertibkan itu.

"Tapi, sayangnya para pedagang pancakan itu enggan (tidak mau) untuk menempati stan di dalam dan di barat pasar itu," paparnya.

Selain itu, Hoedy menyebutkan berdasarkan dari hasil analisa dan kajian yang dilakukan, para pedagang pancakan itu sebenarnya sudah menempati posisi atau kelas ekonomi atas jika mau menempati stan yang sudah disiapkan Disperindag Pemkab Sidoarjo.

"Bahkan, mereka sudah di atas melebihi pedagang yang punya hak pakai stan itu. Para pedagang yang ada di depan itu memang termasuk kategori yang sulit untuk dibina dan tidak mau ditertibkan. Kami pun sepakat kalau memang harus segera ditertibkan bersama tim Satpol PP Pemkab Sidoarjo," tandasnya. Hel/Waw



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Pemkab Sidoarjo Harus Kembalikan Penataan Pasar Larangan ke Aturan Semula



Suasana hearing HPP dengan Komisi Komisi A B ,Disperindag dan Pol PP ,Kamis (13/4) di Kantor Dewan (Foto : Rino Tutuko)

SIDOARJO, RadarBangsa.co.id – HPP (Himpunan Pedagang Pasar) Se - Kabupaten Sidoarjo minta ketegasan untuk melakukan penertiban penataan pedagang di pasar larangan saat hearing dengan Komisi A ,B ,Pol PP serta Dinas Disperindag ,Kamis (13/4) di Kantor Dewan.

Damroni selaku ketua Pimpinan hearing minta konsep penertiban ,penataan pedagang pasar larangan pada Disperindag untuk segera di serahkan .

Masih lanjut Damroni kita jangan takut pada siapa pun untuk penataan Pasar Larangan kembalikan ke aturannya ruang terbuka hijau .

Emir Selaku wakil Ketua Dewan menyambung dalam hearing ,kita segera menata pasar Larangan secepatnya biar perekonomian berjalan lancar ,kalau sudah penertiban jangan dibuat tempat parkir , buat ruang terbuka hijau .

Bambang Selaku ketua Komisi B menyatakan , Pasar Larangan belum ber SNI ,untuk menuju SNI ,caranya harus bersih nyaman dan bersinergi dengan penataan pedagang harus ditertibkan ,kita tidak bisa hanya mengandalkan Sat Pol PP saja ,tapi haru ada unsur lain yang terlibat membantu .



Kayan selaku wakil ketua Dewan minta pada Disperindag dan Pol PP untuk segera menyelesaikan penertiban penataan pedagang, serta kembali ke aturan buat ruang terbuka hijau jangan dibuat tempat parkir .

Nur Hasan Zakaria Selaku ketua HPP (Himpunan Pedagang Pasar) minta penertiban penataan sesuai aturan yang ada .

Yani mewakili Pol PP kita siap siap saja untuk melakukan penertiban kapan pun diminta , tapi kita masih terbentur kekurangan anggaran semua penertiban berkordinasi dengan TNI -Polri secara terukur .

